Idarah Tarbawiyah: Journal of Management in Islamic Education
Vol. 7 No. 11 (2026), hlm. 233-245, DOI: 10.32832/itjmie.v7i11.25056
ISSN: 2654-5845 (Online)

Pendidikan multikultural berbasis nilai Islam dan budaya Melayu Pesisir Selat Melaka

Deni Suryanto, Muzdalena*, Azmiyati, Imam Muhammad Asy Syatibi, Abdi Mubarok, Katijah
Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai, Indonesia
*sonimuzdalena@gmail.com

Abstract

This study examines how Islamic values and Malay coastal culture along the Strait of Malacca can serve as an integrated foundation for multicultural education in Riau, Indonesia. The discussion is triggered by a widening gap between the province's improving statistical score on the Religious Harmony Index and recurring reports of intolerance and student violence in several regions, which indicates that a rising numerical achievement does not automatically guarantee lived social harmony. Using a qualitative descriptive approach, this study draws on document analysis, institutional reports, and recent media coverage related to religious moderation programs and local curriculum development in coastal Riau, particularly Dumai. The findings show that Malay coastal tradition, expressed through customary guidance known as tunjuk ajar, carries values of deliberation, mutual respect, and communal cooperation that closely mirror core Islamic teachings such as ta'aruf, tasamuh, and ukhuwah. These shared values offer a contextual entry point for multicultural education that goes beyond formal tolerance campaigns. The study concludes that Islamic educational institutions in coastal Riau need to translate this cultural and religious convergence into concrete curriculum content, teacher preparation, and classroom practice, rather than treating harmony merely as an administrative indicator reported upward.

Keywords: *coastal Malay culture; Islamic values; local wisdom; multicultural education; religious moderation.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana nilai-nilai Islam dan budaya Melayu pesisir Selat Melaka dapat dijadikan fondasi yang menyatu bagi pendidikan multikultural di Provinsi Riau. Kajian ini berangkat dari kesenjangan yang mulai terlihat antara capaian statistik Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Riau yang terus membaik dan sejumlah laporan intoleransi maupun kekerasan yang masih terjadi di lingkungan pendidikan, sehingga menunjukkan bahwa angka indeks yang tinggi belum tentu sejalan dengan kondisi kerukunan yang benar-benar dirasakan masyarakat. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menelaah dokumen kebijakan, laporan lembaga, serta pemberitaan media terkini terkait program moderasi beragama dan pengembangan kurikulum lokal di kawasan pesisir Riau, khususnya Kota Dumai. Hasil kajian menunjukkan bahwa tunjuk ajar Melayu, sebagai pedoman hidup masyarakat pesisir, memuat nilai musyawarah, saling menghargai, dan gotong royong yang sejalan erat dengan ajaran Islam tentang taaruf, tasamuh, dan ukhuwah. Titik temu ini membuka jalan bagi pendidikan multikultural yang lebih kontekstual, tidak sekadar kampanye toleransi yang bersifat formal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa lembaga pendidikan Islam di kawasan pesisir perlu menerjemahkan titik temu budaya dan agama tersebut ke dalam muatan kurikulum, penyiapan guru, dan praktik pembelajaran yang konkret, bukan sekadar menjadikan kerukunan sebagai angka laporan semata.

Copyright (c) author/s (2026)
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA)
Article Information: Submitted 02 September 2026, Accepted 07 November 2026, Published 15 November 2026

Kata kunci: budaya Melayu pesisir; kearifan lokal; moderasi beragama; nilai Islam; pendidikan multikultural.

Pendahuluan

Kawasan pesisir Selat Melaka yang membentang dari Dumai, Bengkalis, hingga Rokan Hilir bukan sekadar garis pantai yang memisahkan daratan dan laut. Sepanjang sejarahnya, wilayah ini menjadi jalur pelayaran dan perdagangan yang mempertemukan pedagang Arab, India, Tionghoa, dan berbagai suku Nusantara, sehingga corak masyarakat yang terbentuk di sana sejak awal memang majemuk (Rahmat, 2019). Percampuran itu melahirkan budaya Melayu pesisir yang terbuka terhadap pendatang namun tetap memiliki akar keislaman yang kuat, karena Islam masuk dan berkembang di wilayah ini melalui jalur perdagangan yang sama. Warisan itu masih dapat dirasakan hari ini, misalnya melalui tradisi memasang pelita menjelang bulan Ramadan yang hidup di kalangan masyarakat Melayu pesisir, khususnya di Kabupaten Bengkalis, sebagai penanda datangnya bulan suci sekaligus ajang mempererat silaturahmi antar warga (Dinas Pendidikan Provinsi Riau, t.t.).

Sayangnya, warisan keberagaman yang sejak lama telah teruji tersebut kini menghadapi tantangan baru. Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang dirilis Kementerian Agama menunjukkan tren yang tampak menggembirakan. Provinsi Riau yang pada 2021 sempat berada di tiga posisi terbawah nasional dengan skor 69,2, melesat ke peringkat 16 pada 2022, dan pada pertengahan 2025 dilaporkan berada di peringkat kedua nasional (Media Center Riau, 2025). Namun demikian, kenaikan angka statistik semacam ini kerap tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan. Sorotan bertajuk Anomali Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau, Antara Capaian Statistik dan Realitas Kondusifitas Sosial, yang dimuat media lokal pada akhir Agustus 2026, mengingatkan bahwa capaian angka yang tinggi tidak serta merta berbanding lurus dengan rasa aman dan harmoni yang dialami warga sehari-hari (Cakaplah.com, 2026). Kesenjangan antara angka dan pengalaman hidup inilah yang menjadi titik tolak kajian ini.

Kesenjangan tersebut semakin terasa ketika dikaitkan dengan kasus-kasus nyata di dunia pendidikan. Setara Institute (2025) mencatat kasus kekerasan yang berujung pada kematian seorang siswa sekolah dasar, dengan dugaan motif yang bersinggungan dengan sikap intoleran, sebuah peringatan keras bahwa ruang pendidikan belum sepenuhnya aman dari benih kebencian terhadap perbedaan. Di Riau sendiri, dugaan kekerasan antar siswa di lingkungan asrama sebuah sekolah kejuruan di Pekanbaru turut menjadi sorotan publik pada pertengahan 2026, meski pihak sekolah menyebutnya sebagai perkelahian biasa antar sesama pelajar (Nadariau.com, 2026). Terlepas dari perdebatan mengenai motif pastinya, kasus semacam ini menegaskan bahwa relasi antar siswa yang majemuk latar belakangnya memerlukan pembinaan nilai yang lebih serius, bukan sekadar slogan.

Merespons kegelisahan tersebut, sejumlah langkah mulai diambil oleh lembaga pemerintah dan pendidikan di kawasan pesisir. Kepolisian Resor Dumai misalnya menggelar kuliah umum bertema anti intoleransi dan antikorupsi bagi mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Riau Pesisir (Riauterkini.com, 2026). Kantor

Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau juga menggagas program bertajuk Kurikulum Cinta untuk memperkuat benteng pelajar dari narkoba dan perundungan, sekaligus menggelar sosialisasi penguatan IKUB langsung di Kota Dumai (Media Center Riau, 2025). Pada level yang lebih strategis, Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin (IAITF) Dumai bahkan tengah merumuskan konsentrasi baru bernama Pendidikan Agama Islam Budaya Melayu Riau, sebagai upaya menjadikan kampus tersebut sebagai pusat kajian Islam berbasis tamadun Melayu di kawasan pesisir Selat Melaka (IAITF Dumai, 2026). Langkah-langkah ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa pendidikan multikultural tidak bisa lagi dijalankan secara generik, melainkan harus berpijak pada akar budaya dan keagamaan masyarakat setempat.

Kajian tentang pendidikan multikultural dalam bingkai Islam sesungguhnya bukan hal baru. Secara teoretis, konsep pendidikan multikultural telah lama dirumuskan oleh Banks (2015) sebagai upaya mengintegrasikan pengalaman berbagai kelompok budaya ke dalam kurikulum dan praktik pengajaran, sementara di konteks Indonesia, Tilaar (2004) dan Yaqin (2011) menegaskan pentingnya multikulturalisme sebagai basis demokrasi dan keadilan dalam transformasi pendidikan nasional. Ansori, Budiman, dan Nahdi (2019) misalnya menegaskan bahwa Islam memiliki fondasi teologis yang kuat untuk mendukung penghormatan terhadap keberagaman, sementara Bahri (2020) menunjukkan bagaimana filsafat pendidikan Islam dapat menjadi kerangka konseptual bagi pendidikan multikultural secara lebih luas. Camelia dan Suryandari (2021) melihat persoalan ini dari perspektif global dan menekankan pentingnya kontekstualisasi lokal, agar pendidikan multikultural tidak berhenti sebagai wacana normatif. Di sisi lain, kajian tentang kearifan lokal Melayu sebagai basis pendidikan karakter juga telah banyak dilakukan, misalnya oleh Fajarini (2014) yang menegaskan peran kearifan lokal dalam pembentukan karakter, atau kajian mengenai kearifan lokal Melayu perbatasan yang tetap relevan dijadikan rujukan pendidikan hingga saat ini. Meski demikian, sebagian besar kajian tersebut masih membahas nilai Islam dan kearifan lokal secara terpisah, atau mengambil konteks Melayu secara umum tanpa menukik pada kekhasan masyarakat pesisir Selat Melaka yang memiliki pengalaman sejarah interaksi lintas budaya yang sangat panjang.

Kebaruan kajian ini terletak pada upaya menyandingkan dua sumber nilai tersebut, yakni ajaran Islam dan tunjuk ajar budaya Melayu pesisir, sekaligus mengujinya dengan realitas terkini di kawasan Dumai dan sekitarnya, termasuk dinamika pembentukan Daerah Otonomi Baru Riau Bagian Pesisir yang tengah bergulir sejak pertengahan 2026 dan berpotensi memperkuat kembali kesadaran identitas kewilayahan masyarakat pesisir (Syahrul, 2026). Penelitian ini tidak berhenti pada tataran konseptual, tetapi berusaha menautkan nilai-nilai tersebut dengan langkah nyata yang sedang ditempuh oleh lembaga pendidikan Islam di kawasan tersebut. Atas dasar itu, tulisan ini bertujuan menganalisis titik temu nilai Islam dan budaya Melayu pesisir Selat Melaka sebagai basis pendidikan multikultural, sekaligus merumuskan implikasinya bagi penguatan kurikulum dan praktik pendidikan di lembaga pendidikan Islam setempat, khususnya dalam menjawab kesenjangan antara capaian statistik kerukunan dan realitas sosial yang masih menyisakan pekerjaan rumah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan strategi studi kasus pada kawasan pesisir Selat Melaka, mencakup Kota Dumai dan wilayah sekitarnya seperti Bengkalis dan Rokan Hilir. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji, yaitu titik temu nilai Islam dan budaya Melayu pesisir dalam pendidikan multikultural, lebih tepat dipahami melalui pemaknaan mendalam terhadap dokumen, kebijakan, dan peristiwa aktual, ketimbang melalui pengukuran angka semata.

Data penelitian bersumber dari dua jenis. Pertama, data kepustakaan yang diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu mengenai pendidikan multikultural, moderasi beragama, dan kearifan lokal Melayu. Kedua, data dokumen dan pemberitaan aktual yang meliputi laporan resmi Kementerian Agama dan pemerintah daerah, rilis lembaga pemantau seperti Setara Institute, serta pemberitaan media massa yang telah diverifikasi kredibilitasnya, termasuk dokumentasi kegiatan lembaga pendidikan tinggi Islam di Dumai. Penulis pertama, yang berkedudukan sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah di salah satu perguruan tinggi Islam di Dumai, turut memberikan pengamatan partisipatif atas dinamika perumusan kurikulum berbasis Budaya Melayu Riau yang berlangsung di lingkungan kampus tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran pemberitaan terkini secara sistematis, dengan periode penelusuran difokuskan pada rentang 2021 hingga Agustus 2026 untuk menangkap perkembangan paling mutakhir. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan secara berulang hingga diperoleh pemahaman yang utuh. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan informasi dari dokumen resmi, pemberitaan media, dan kajian akademik, agar simpulan yang dihasilkan tidak bertumpu pada satu sumber saja.

Hasil dan Pembahasan

A. Masyarakat pesisir selat Melaka, akar kemajemukan yang terbentuk oleh sejarah

Untuk memahami mengapa kawasan pesisir Selat Melaka relevan dijadikan laboratorium pendidikan multikultural, perlu ditelusuri terlebih dahulu bagaimana kemajemukan di kawasan ini terbentuk. Selat Melaka bukan sekadar jalur pelayaran, melainkan ruang pertemuan peradaban yang telah berlangsung berabad-abad. Fahrudin (2013) mencatat bahwa kawasan Melayu Riau, termasuk pesisirnya, sejak lama menjadi pusat persinggahan pedagang dari berbagai bangsa, yang kemudian menetap dan berbaur dengan penduduk asli. Percampuran itu bukan hanya melahirkan keragaman etnis, tetapi juga memperkaya khazanah keagamaan dan budaya setempat. Rahmat (2019) misalnya menguraikan bagaimana orang Bugis turut mengambil peran penting dalam struktur pemerintahan Kerajaan Johor Riau Lingga Pahang, sebuah bukti bahwa kekuasaan dan kebudayaan Melayu di kawasan ini sejak awal terbuka terhadap kontribusi kelompok pendatang.

Realitas historis ini berbeda dengan gambaran umum yang kadang muncul, seolah masyarakat Melayu adalah kelompok yang tertutup dan homogen. Sebaliknya, identitas

Melayu di pesisir Selat Melaka justru terbentuk melalui proses akulturasi panjang, dengan Islam sebagai perekat utama yang menyatukan berbagai latar belakang etnis tersebut ke dalam satu identitas bersama, tanpa harus menghapus keunikan masing-masing kelompok. Prinsip inilah yang kemudian dikenal luas dalam ungkapan adat, bahwa Melayu identik dengan Islam, namun keislaman itu sendiri hadir dalam wajah yang ramah terhadap perbedaan, karena tumbuh dari pengalaman hidup berdampingan dengan pedagang dan pendatang lintas bangsa selama berabad-abad.

Kondisi demografis Riau hari ini masih mencerminkan warisan kemajemukan tersebut. Data yang disampaikan pemerintah provinsi menunjukkan bahwa dari sekitar 6,8 juta penduduk Riau, mayoritas memeluk Islam, diikuti oleh pemeluk Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, dan penghayat kepercayaan lainnya (Media Center Riau, 2025). Kemajemukan ini semakin terasa di kawasan pesisir seperti Dumai, yang sejak lama dikenal sebagai kota pelabuhan dan kawasan industri, sehingga menarik pendatang dari berbagai daerah dan latar belakang untuk bekerja dan menetap. Dinamika inilah yang membuat isu kerukunan dan pendidikan multikultural bukan sekadar wacana akademik, melainkan kebutuhan nyata yang dihadapi masyarakat setiap hari, baik di ruang publik, tempat kerja, maupun ruang kelas.

Perkembangan terbaru menambah lapisan baru pada dinamika kewilayahan ini. Pada akhir Agustus 2026, Pemerintah Kota Dumai secara resmi menyatakan dukungan terhadap pembentukan Daerah Otonomi Baru Riau Bagian Pesisir, sebuah inisiatif yang lahir dari kesepakatan yang dikenal dengan sebutan Mufakat Dumai (Syahrul, 2026). Wacana pemekaran wilayah semacam ini biasanya diiringi oleh penguatan kembali kesadaran identitas kewilayahan, termasuk identitas budaya Melayu pesisir yang selama ini kerap berada di bawah bayang-bayang wilayah Riau daratan. Di satu sisi, momentum ini membuka peluang bagi penguatan pendidikan berbasis budaya lokal, namun di sisi lain juga menuntut kehati-hatian, agar penguatan identitas kewilayahan tidak berkembang menjadi sentimen eksklusif yang justru mengikis semangat keterbukaan yang sejak awal menjadi ciri khas masyarakat pesisir Selat Melaka.

Dengan demikian, kemajemukan masyarakat pesisir Selat Melaka perlu dipahami sebagai dua sisi mata uang. Di satu sisi, ia adalah warisan sejarah yang kaya dan modal sosial yang besar bagi penguatan toleransi. Di sisi lain, tanpa pengelolaan yang sadar dan terencana, terutama melalui jalur pendidikan, warisan tersebut berpotensi tergerus oleh dinamika politik kewilayahan, arus migrasi, maupun pengaruh ideologi dari luar yang tidak jarang membawa cara pandang yang lebih tertutup terhadap perbedaan.

B. Tunjuk ajar melayu dan nilai Islam, dua sumber yang saling menopang

Masyarakat Melayu pesisir memiliki pedoman hidup yang diwariskan turun-temurun, yang dikenal dengan sebutan tunjuk ajar. Berbeda dengan hukum formal, tunjuk ajar disampaikan melalui pantun, ungkapan adat, dan nasihat lisan orang tua kepada anak cucu, namun daya ikatnya terhadap perilaku masyarakat tidak kalah kuat. Fajarini (2014) menegaskan bahwa kearifan lokal semacam ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter, karena nilai yang terkandung di dalamnya sudah lama diinternalisasi masyarakat sejak usia dini, jauh sebelum mereka mengenal pendidikan formal di sekolah.

Beberapa nilai inti dalam tunjuk ajar Melayu sangat relevan dengan semangat pendidikan multikultural. Nilai musyawarah misalnya, mengajarkan bahwa setiap persoalan bersama harus diselesaikan melalui perundingan yang melibatkan semua pihak, bukan dengan mengedepankan ego kelompok tertentu. Nilai budi bahasa mengajarkan cara berkomunikasi yang santun terhadap siapa pun, termasuk kepada orang yang berbeda suku maupun agama. Sementara nilai gotong royong menegaskan bahwa kerja sama dan saling membantu adalah keharusan sosial yang tidak memandang latar belakang seseorang. Kajian mengenai revitalisasi kearifan lokal Melayu bagi pendidikan karakter mahasiswa menunjukkan bahwa nilai-nilai semacam ini, meski berakar dari tradisi lama, tetap relevan digunakan sebagai kompas moral bagi generasi digital yang tengah mengalami krisis identitas akibat derasnya arus informasi global (Indra, 2019).

Yang menarik, nilai-nilai tunjuk ajar tersebut ternyata memiliki padanan yang jelas dalam ajaran Islam. Konsep taaruf, yang secara harfiah berarti saling mengenal, menjadi dasar bagi umat Islam untuk membangun relasi dengan siapa pun tanpa memandang suku maupun bangsa, sebagaimana termaktub dalam prinsip bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku justru agar saling mengenal, bukan untuk saling meninggikan diri. Konsep tasamuh mengajarkan sikap toleran dan lapang dada terhadap perbedaan, sementara ukhuwah menekankan persaudaraan yang tidak terbatas pada kesamaan suku atau golongan. Bahri (2020) menunjukkan bahwa filsafat pendidikan Islam sesungguhnya memiliki ruang yang luas bagi penghormatan terhadap keberagaman, sehingga pendidikan multikultural bukan konsep asing yang dipaksakan masuk ke dalam kurikulum keislaman, melainkan sesuatu yang secara alami tumbuh dari akar ajarannya sendiri.

Untuk memperjelas titik temu antara kedua sumber nilai ini, dapat dilihat pemetaan sederhana pada Tabel 1. Pemetaan ini bukan dimaksudkan untuk menyamakan begitu saja antara adat dan syariat, karena keduanya tetap memiliki kedudukan yang berbeda, melainkan untuk menunjukkan bahwa keduanya saling menopang dan memperkuat, sehingga penanaman nilai multikultural kepada peserta didik di kawasan pesisir dapat dilakukan melalui dua pintu masuk sekaligus, yaitu pintu keagamaan dan pintu kebudayaan, yang keduanya sama-sama dekat dengan keseharian masyarakat.

Tabel 1. Titik temu nilai tunjuk ajar Melayu dan ajaran Islam

Nilai Tunjuk Ajar Melayu	Padanan Nilai Islam	Makna Inti
Musyawarah	Syura	Penyelesaian persoalan bersama melalui perundingan, tanpa mengedepankan ego kelompok
Budi bahasa	Akhlak karimah	Cara berkomunikasi yang santun kepada siapa pun, termasuk yang berbeda suku dan agama
Gotong royong	Ta'awun	Kerja sama dan tolong-menolong tanpa memandang latar belakang
Menghormati tamu dan pendatang	Taaruf	Sikap terbuka dan ingin saling mengenal dengan pihak yang berbeda
Menjaga marwah bersama	Ukhuwah dan tasamuh	Persaudaraan dan toleransi yang menjaga keutuhan hidup bersama

Sumber: Diolah dari Fajarini (2014), Bahri (2020), dan tradisi lisan tunjuk ajar Melayu pesisir.

Penting untuk dicatat bahwa titik temu ini bukan sekadar konstruksi akademik yang dipaksakan. Ungkapan adat Melayu yang sangat populer, bahwa adat bersendi syarak

dan syarak bersendi Kitabullah, justru menegaskan bahwa dalam pandangan masyarakat pesisir sendiri, adat dan agama memang tidak dapat dipisahkan, bahkan adat yang sah adalah adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Prinsip ini menjadi modal berharga bagi lembaga pendidikan Islam di kawasan pesisir, karena mereka tidak perlu membangun jembatan dari nol antara materi keislaman dan muatan lokal, melainkan cukup menegaskan kembali dan menyistematisasikan hubungan yang sesungguhnya sudah lama hidup dalam kesadaran masyarakat.

Sayangnya, dalam praktik pendidikan sehari-hari, potensi ini belum banyak digarap secara serius. Materi pendidikan agama Islam di banyak sekolah maupun madrasah masih cenderung disampaikan secara normatif dan terpisah dari muatan lokal, sementara materi muatan lokal seperti Budaya Melayu Riau kerap diajarkan sebagai pengetahuan budaya semata, tanpa dikaitkan secara eksplisit dengan nilai keislaman yang menjadi jiwanya. Kesenjangan pengajaran semacam inilah yang perlu dijembatani agar potensi titik temu antara nilai Islam dan budaya Melayu pesisir benar-benar termanfaatkan dalam proses pendidikan multikultural di kawasan ini.

C. Antara angka dan rasa, membaca kesenjangan indeks kerukunan beragama

Bagian ini mengungkap temuan mengenai kesenjangan antara capaian statistik dan realitas sosial, sebagaimana disinggung dalam latar belakang. Tabel 2 menyajikan perkembangan skor dan peringkat Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 2. Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Riau

Tahun	Skor / Peringkat	Keterangan
2021	Skor 69,2 (tiga posisi terbawah nasional)	Survei awal Kemenag RI menunjukkan capaian yang masih rendah
2022	Peringkat 16 nasional (sekitar 76 persen)	Peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya
2024	Rata-rata nasional 76,47 (kategori Tinggi)	Kepulauan Riau meraih peringkat dua nasional dengan skor 82,21
2025	Peringkat dua nasional	Gubernur Riau menegaskan pentingnya menjaga capaian tersebut
2026	Disorot sebagai anomali	Media lokal menyoroti kesenjangan antara angka indeks dan kondusifitas sosial riil

Sumber: Diolah dari Media Center Riau (2025), Kompas.com (2025), STAIN SAR Kepri (2025), dan Cakaplah.com (2026).

Data pada Tabel 2 menunjukkan lonjakan yang cukup signifikan, dari posisi tiga terbawah nasional pada 2021 menjadi peringkat dua nasional pada pertengahan 2025. Jika dibaca sepintas, data ini seolah menggambarkan keberhasilan besar dalam pembinaan kerukunan umat beragama di Riau. Gubernur Riau Abdul Wahid bahkan secara terbuka meminta agar capaian tersebut terus dijaga dengan mengedepankan nilai toleransi, gotong royong, dan saling menghormati antar pemeluk agama (Kompas.com, 2025). Sukestiyarno, Sugiyana, Sulthon, Wuriningsih, dan Hartutik (2022) dalam kajian mereka di Kota Semarang juga menegaskan bahwa indeks semacam ini idealnya mencerminkan empat dimensi moderasi beragama sekaligus, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodasi terhadap budaya lokal, bukan sekadar satu angka tunggal.

Namun demikian, angka yang tinggi pada level provinsi tidak selalu tercermin secara merata di tingkat kabupaten maupun kota, apalagi hingga ke level satuan pendidikan. Sorotan media lokal yang secara eksplisit menggunakan istilah anomali untuk menggambarkan kesenjangan antara capaian statistik IKUB dan realitas kondusifitas sosial di Riau (Cakaplah.com, 2026) menjadi pengingat penting bahwa indeks semacam ini rawan menjadi angka yang dikejar untuk kepentingan pelaporan administratif, tanpa disertai perubahan nyata pada perilaku sehari-hari masyarakat, termasuk di lingkungan sekolah.

Kasus-kasus konkret memperkuat kekhawatiran ini. Pada level nasional, kematian seorang siswa sekolah dasar akibat kekerasan yang diduga bermotif intoleran menjadi peringatan keras bahwa ruang pendidikan dasar sekalipun belum sepenuhnya aman dari sikap antipati terhadap perbedaan (Setara Institute, 2025). Di Riau sendiri, dugaan kasus perundungan di lingkungan asrama sebuah sekolah kejuruan di Pekanbaru turut mencuat ke publik pada pertengahan 2026, dengan pihak sekolah membantah unsur perundungan dan menyebutnya sebagai perkelahian biasa antar sesama pelajar satu angkatan (Nadariau.com, 2026). Terlepas dari perbedaan penafsiran atas motif dan bentuk kekerasan tersebut, kasus-kasus semacam ini menunjukkan bahwa relasi antar siswa yang beragam latar belakangnya, baik dari sisi suku, ekonomi, maupun senioritas dalam lingkungan asrama, tetap rawan memicu gesekan apabila tidak dibarengi pembinaan nilai yang memadai.

Kesenjangan antara angka dan rasa ini sebenarnya bukan hal yang mengejutkan jika dilihat dari cara kerja indeks itu sendiri. Secara metodologis, Indeks Kerukunan Umat Beragama dihitung dari rata-rata skor tiga variabel, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama, yang umumnya diperoleh melalui survei persepsi terhadap sampel responden terbatas (Badan Pusat Statistik, 2023). Metode semacam ini memang efektif untuk memotret kecenderungan umum, namun rentan kehilangan sensitivitas terhadap pengalaman kelompok minoritas maupun peristiwa spesifik yang terjadi di tingkat akar rumput, termasuk di lingkungan sekolah dan kampus. Dengan kata lain, indeks yang tinggi pada level provinsi tidak serta merta berarti bahwa setiap siswa, dari latar belakang apa pun, merasa setara dan diterima di ruang kelasnya masing-masing.

Temuan ini menegaskan pentingnya membaca data kerukunan secara kritis, tidak hanya sebagai prestasi yang dibanggakan, tetapi juga sebagai sinyal untuk terus memperbaiki praktik di lapangan. Bagi lembaga pendidikan Islam di kawasan pesisir, kesenjangan ini semestinya menjadi dorongan untuk tidak berpuas diri dengan slogan kerukunan semata, melainkan menerjemahkannya ke dalam kurikulum, metode pengajaran, dan pembinaan karakter yang benar-benar menyentuh keseharian peserta didik.

D. Ikhtiar kelembagaan di kawasan pesisir, dari kuliah umum hingga kurikulum berbasis budaya

Meskipun kesenjangan antara angka dan realitas sosial masih terasa, sejumlah ikhtiar kelembagaan yang berlangsung di kawasan pesisir Selat Melaka pada periode 2025 hingga 2026 menunjukkan arah yang menjanjikan. Langkah-langkah ini bervariasi, mulai dari kegiatan edukasi ringan hingga perumusan kurikulum jangka panjang.

Pada level penguatan kesadaran, Kepolisian Resor Dumai menggelar kuliah umum bertema anti intoleransi dan antikorupsi bagi mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Riau Pesisir, sebuah bentuk kolaborasi antara aparat keamanan dan dunia pendidikan tinggi yang jarang terjadi namun penting sebagai langkah pencegahan dini (Riauterkini.com, 2026). Kolaborasi semacam ini menegaskan bahwa isu intoleransi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai persoalan keagamaan, melainkan juga persoalan ketertiban sosial yang perlu ditangani lintas sektor.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau juga mengambil peran aktif melalui program yang dinamai Kurikulum Cinta, yang secara khusus dirancang untuk memperkuat benteng pelajar dari ancaman narkoba dan perundungan. Program ini penting dicatat karena menempatkan isu kerukunan dan perlindungan siswa dalam satu kerangka yang sama, dengan asumsi bahwa siswa yang tumbuh dalam lingkungan yang penuh kasih dan saling menghormati akan lebih kebal terhadap perilaku merusak, termasuk sikap intoleran terhadap sesama. Selain itu, Kemenag Riau juga menggelar sosialisasi penguatan Indeks Kerukunan Umat Beragama langsung di Kota Dumai pada November 2025, dengan menegaskan bahwa keberagaman di Riau adalah kekayaan sosial yang harus dijaga, bukan sumber perpecahan (Media Center Riau, 2025).

Pada level yang lebih strategis dan berjangka panjang, langkah yang ditempuh Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai patut mendapat perhatian khusus. Melalui forum diskusi kelompok terfokus yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, kampus ini merumuskan capaian pembelajaran lulusan untuk konsentrasi baru bernama Pendidikan Agama Islam Budaya Melayu Riau. Dekan Fakultas Tarbiyah IAITF Dumai, Deni Suryanto, menyampaikan bahwa konsentrasi ini diharapkan menjadi kekuatan pembeda bagi kampus tersebut sebagai institusi Islam yang berbasis tamadun Melayu di kawasan pesisir Selat Melaka (IAITF Dumai, 2026). Forum tersebut juga dilatarbelakangi oleh kondisi riil di lapangan, di mana banyak guru mata pelajaran Budaya Melayu Riau justru berasal dari disiplin ilmu lain, sehingga penguasaan mereka terhadap muatan lokal tersebut belum tentu memadai (IAITF Dumai, 2026). Langkah ini menunjukkan bahwa persoalan pendidikan multikultural berbasis budaya lokal bukan hanya soal materi ajar, tetapi juga soal kesiapan sumber daya manusia yang akan menyampaikannya di kelas.

Inisiatif serupa juga terlihat pada level provinsi melalui penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran yang dipadukan dengan tradisi Pacu Jalur di Kabupaten Kuantan Singingi pada 2026. Menteri Agama menegaskan bahwa perpaduan semacam ini bukan sekadar strategi seremonial, melainkan model praktik baik dalam mengelola keberagamaan yang ramah dan terbuka, sekaligus berakar pada nilai-nilai lokal (Harian Haluan Riau, 2026). Meskipun kegiatan ini berlangsung di luar kawasan pesisir, pola pendekatannya, yaitu memadukan syiar keagamaan dengan tradisi budaya setempat, sangat relevan untuk direplikasi di kawasan pesisir Selat Melaka, misalnya melalui perpaduan kegiatan keagamaan sekolah dengan tradisi lokal seperti pemasangan pelita menjelang Ramadan yang telah lama hidup di kalangan masyarakat Bengkalis.

Rangkaian ikhtiar tersebut menunjukkan bahwa kesadaran akan pentingnya pendidikan multikultural berbasis nilai Islam dan budaya lokal sesungguhnya sudah mulai tumbuh di berbagai lini, mulai dari aparat keamanan, kementerian, hingga

perguruan tinggi Islam. Persoalannya, langkah-langkah tersebut masih berjalan secara terpisah-pisah dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kurikulum yang utuh dan berkelanjutan, sehingga dampaknya cenderung bersifat monumental, hangat diberitakan pada saat kegiatan berlangsung, namun belum tentu menetap sebagai kebiasaan dan sikap peserta didik dalam jangka panjang.

E. Menuju model pendidikan multikultural berbasis Islam dan budaya pesisir

Berdasarkan temuan-temuan di atas, dapat dirumuskan beberapa elemen penting yang perlu ada dalam model pendidikan multikultural berbasis nilai Islam dan budaya Melayu pesisir Selat Melaka. Elemen pertama adalah integrasi kurikulum, bukan sekadar penambahan mata pelajaran baru. Materi pendidikan agama Islam dan muatan lokal Budaya Melayu Riau semestinya dirancang secara berdampingan, dengan menonjolkan titik temu nilai seperti yang telah diuraikan pada Tabel 1, sehingga peserta didik memahami bahwa menghormati perbedaan bukan nilai impor dari luar, melainkan bagian dari identitas keislaman dan kemelayuan mereka sendiri. Langkah yang tengah dirintis IAITF Dumai melalui konsentrasi Pendidikan Agama Islam Budaya Melayu Riau merupakan contoh konkret dari arah ini, meski masih perlu diikuti oleh penerapan serupa di jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Elemen kedua adalah penguatan kapasitas guru. Temuan bahwa banyak guru mata pelajaran Budaya Melayu Riau berasal dari disiplin ilmu lain (IAITF Dumai, 2026) menunjukkan bahwa persoalan mendasar sesungguhnya bukan pada ketiadaan nilai, melainkan pada ketiadaan tenaga pendidik yang mampu menerjemahkan nilai tersebut secara meyakinkan di depan kelas. Oleh karena itu, program pendidikan profesi maupun pelatihan berkelanjutan bagi guru, baik guru pendidikan agama Islam maupun guru muatan lokal, perlu dirancang secara terpadu, sehingga keduanya memiliki bekal yang memadai untuk saling melengkapi materi ajar masing-masing.

Elemen ketiga adalah pendekatan berbasis pengalaman, bukan sekadar hafalan normatif. Kegiatan semacam kuliah umum anti intoleransi yang digelar Polres Dumai maupun sosialisasi penguatan IKUB (Riauterkini.com, 2026; Media Center Riau, 2025) perlu ditindaklanjuti dengan aktivitas belajar yang melibatkan interaksi langsung antar peserta didik dari latar belakang berbeda, misalnya melalui proyek belajar bersama, kunjungan lintas komunitas keagamaan, atau pelibatan siswa dalam kegiatan budaya lintas etnis. Pendekatan berbasis pengalaman semacam ini terbukti lebih efektif membentuk sikap toleran dibandingkan sekadar penyampaian materi secara satu arah, karena peserta didik belajar langsung dari interaksi nyata, bukan dari konsep abstrak semata.

Elemen keempat adalah pemantauan yang tidak berhenti pada angka indeks semata. Mengingat kesenjangan antara capaian statistik dan realitas sosial yang telah diuraikan sebelumnya, lembaga pendidikan di kawasan pesisir perlu mengembangkan instrumen evaluasi internal yang lebih peka terhadap dinamika di tingkat kelas dan asrama, semisal melalui pemantauan pola relasi antar siswa, penanganan kasus perundungan secara transparan, dan pelibatan orang tua maupun tokoh masyarakat adat dalam proses pembinaan. Dengan cara ini, kerukunan tidak hanya menjadi angka yang dilaporkan ke

atas, tetapi juga menjadi kondisi yang benar-benar dirasakan oleh peserta didik dalam interaksi mereka sehari-hari.

Keempat elemen tersebut pada dasarnya saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Kurikulum yang baik tanpa guru yang mumpuni akan berhenti sebagai dokumen di atas kertas, sementara guru yang mumpuni tanpa pendekatan berbasis pengalaman akan cenderung kembali pada pola pengajaran normatif yang selama ini terbukti kurang efektif membentuk sikap. Demikian pula, tanpa pemantauan yang jujur terhadap realitas di lapangan, keberhasilan program pendidikan multikultural hanya akan terlihat di atas kertas laporan, sementara kesenjangan yang sesungguhnya tetap dibiarkan berlangsung di balik angka-angka yang tampak menggembirakan. Model yang diusulkan dalam kajian ini pada akhirnya mengarah pada satu prinsip sederhana, bahwa pendidikan multikultural di kawasan pesisir Selat Melaka akan lebih bertahan lama apabila ia tumbuh dari akar nilai yang sudah dimiliki masyarakatnya sendiri, yakni keislaman dan kemelayuan, ketimbang dipaksakan sebagai program dari luar yang berhenti begitu proyek dan pemberitaannya usai.

Kesimpulan

Kajian ini menegaskan bahwa pendidikan multikultural di kawasan pesisir Selat Melaka tidak perlu dibangun dari titik nol, sebab masyarakatnya telah lama mewarisi dua sumber nilai yang saling menopang, yaitu ajaran Islam dan tunjuk ajar budaya Melayu, dengan prinsip taaruf, tasamuh, dan ukhuwah yang menemukan padanannya dalam nilai musyawarah, budi bahasa, dan gotong royong. Namun demikian, capaian statistik Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau yang melesat dari posisi tiga terbawah nasional pada 2021 menjadi peringkat dua nasional pada 2025 belum tentu berbanding lurus dengan rasa aman dan diterima yang dialami peserta didik di ruang kelas maupun asrama sekolah, sebagaimana ditunjukkan oleh sejumlah kasus kekerasan bermotif intoleran di lingkungan pendidikan. Sejumlah ikhtiar kelembagaan yang berlangsung di kawasan pesisir pada periode 2025-2026, mulai dari kuliah umum anti intoleransi, program Kurikulum Cinta, hingga perumusan konsentrasi Pendidikan Agama Islam Budaya Melayu Riau di IAITF Dumai, menunjukkan kesadaran yang mulai tumbuh namun masih berjalan terpisah dan belum terangkai dalam satu kerangka kurikulum yang utuh. Atas dasar itu, kajian ini merumuskan model pendidikan multikultural berbasis nilai Islam dan budaya Melayu pesisir yang bertumpu pada empat elemen, yaitu integrasi kurikulum yang menonjolkan titik temu nilai, penguatan kapasitas guru lintas disiplin, pendekatan pembelajaran berbasis pengalaman, serta pemantauan yang tidak berhenti pada angka indeks semata, sehingga kerukunan tidak hanya menjadi angka yang dilaporkan ke atas, melainkan pengalaman hidup berdampingan yang benar-benar dirasakan oleh setiap peserta didik yang berbeda suku, agama, maupun latar belakang sosial di ruang kelas mereka.

Daftar Pustaka

Ansori, Y. Z., Budiman, I. A., & Nahdi, D. S. (2019). Islam dan pendidikan multikultural. *Jurnal Cakrawala Pendas, 5*(2). https://doi.org/10.31949/jcp.v5i2.1370

Badan Pusat Statistik. (2023). *Metadata indikator: Indeks kerukunan umat beragama*. Retrieved from https://sirusa.web.bps.go.id/metadata/indikator/13761

Bahri, S. (2020). Multicultural education in Islamic education philosophy perspective.

Istawa: Jurnal Pendidikan Islam, 5(2). https://doi.org/10.24269/ijpi.v5i2.2891

Banks, J. A. (2015). *Cultural diversity and education: Foundations, curriculum, and teaching* (6th ed.). New York, NY: Routledge.

Cakaplah.com. (2026, August 27). Anomali indeks kerukunan umat beragama (IKUB) Provinsi Riau: Antara capaian statistik dan realitas kondusifitas sosial. Retrieved from https://www.cakaplah.com/berita/

Camelia, A., & Suryandari, N. (2021). Pendidikan multikultural: Sebuah perspektif global. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 3*(6). https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i6.1649

Dinas Pendidikan Provinsi Riau. (n.d.). *Tradisi memasang lampu di kawasan pesisir Melayu Riau*. Retrieved from https://disdik.riau.go.id/home/beritaBln

Fahrudin, A. (2013). Pusat kajian Islam Melayu: Studi peran Masjid Sultan Riau masa lalu. *Jurnal Lektur Keagamaan, 11*(2), 405–428.

Fajarini, U. (2014). Peranan kearifan lokal dalam pendidikan karakter. *Sosio Didaktika: Social Science Education Journal, 1*(2). https://doi.org/10.15408/sd.v1i2.1225

Handayani, F., Ruswandi, U., Erihadiana, M., & Basari, M. H. (2020). Pendidikan multikultural dalam perspektif ilmu pendidikan Islam (IPI). *Misykat: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah dan Tarbiyah, 5*(2), 67–80. https://doi.org/10.33511/misykat.v5n2.67-80

Harian Haluan Riau. (2026, April 14). MTQ Provinsi Riau 2026 makin meriah dengan agenda Pacu Jalur. Retrieved from https://riau.harianhaluan.com/nasional/1116993003/mtq-provinsi-riau-2026-makin-meriah-dengan-agenda-pacu-jalur

IAITF Dumai. (2026, May 22). Rumuskan CPL BMR, IAITF libatkan banyak stakeholder. Retrieved from https://iaitfdumai.ac.id/2026/05/22/fgd-perumusan-capaian-pembelajaran-lulusan-cpl-konsentrasi-pendidikan-agama-islam-budaya-melayu-riau-dan-penyiapan-tenaga-pendidik-mata-pelajaran-bmr-kolaborasi-antara-iaitf-dumai-dengan-musyawarah/

Indra, H. (2019). Revitalisasi pendidikan keagamaan Islam era digital 4.0. *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam, 12*(2), 278–288. https://doi.org/10.32832/tawazun.v12i2.2408

Kompas.com. (2025, June 8). Indeks kerukunan umat beragama Riau peringkat dua nasional, Gubernur Abdul Wahid minta capaian ini harus dijaga. Retrieved from https://regional.kompas.com/read/2025/06/08/163910178/indeks-kerukunan-umat-beragama-riau-peringkat-dua-nasional-gubernur-abdul

Media Center Riau. (2025, November 13). Kerukunan umat beragama kunci kemajuan Riau. Retrieved from https://mediacenter.riau.go.id/read/94015/kerukunan-umat-beragama-kunci-kemajuan-riau.html

Nadariau.com. (2026, May 29). Bantah dugaan bullying di asrama, SMK Pertanian Riau sebut insiden murni perkelahian antar siswa. Retrieved from https://nadariau.com/2026/05/29/bantah-dugaan-bullying-di-asrama-smk-pertanian-riau-sebut-insiden-perkelahian-antar-siswa/

Rahmat, S. (2019). Bugis di Kerajaan Melayu: Eksistensi orang Bugis dalam pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang. *Perada, 2*(1), 35–44.

Riauterkini.com. (2026). Polres Dumai beri kuliah umum di ITB Riau Pesisir, tekankan anti intoleransi hingga anti korupsi. Retrieved from https://www.riauterkini.com/index.php?com=isi&id_news=15115231143

Setara Institute. (2025, May 30). *Kasus intoleransi dan kekerasan berujung tewasnya pelajar SD: Negara harus hadir dan mengambil tindakan memadai*. Retrieved from https://setara-institute.org/en/siaran-pers-kasus-intoleransi-dan-kekerasan-berujung-tewasnya-pelajar-sd-negara-harus-hadir-dan-mengambil-

tindakan-memadai/

STAIN SAR Kepri. (2025). *Indeks kerukunan umat beragama 2024: Kepulauan Riau raih peringkat kedua nasional*. Retrieved from https://stainkepri.ac.id/berita/1923-indeks-kerukunan-umat-beragama-2024-kepulauan-riau-raih-peringkat-kedua-nasional.html

Sukestiyarno, S., Sugiyana, S., Sulthon, M., Wuriningsih, W., & Hartutik, H. (2022). Indeks kerukunan umat beragama Kota Semarang ditinjau dari dimensi moderasi beragama. *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, dan Tradisi), 8*(2), 177–190. https://doi.org/10.18784/smart.v8i2.1728

Syahrul, J. (2026, August 27). Pemko Dumai keluarkan rekomendasi persetujuan pembentukan DOB Riau Bagian Pesisir. *Cakaplah.com*. Retrieved from https://www.cakaplah.com/berita/baca/139560/2026/08/27/pemko-dumai-keluarkan-rekomendasi-persetujuan-pembentukan-dob-riau-bagian-pesisir

Tilaar, H. A. R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta, Indonesia: Grasindo.

Yaqin, M. A. (2011). *Pendidikan multikultural: Cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta, Indonesia: Pilar Media.